
**ANALISIS KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TERHADAP
PERMENDIKDASMEN NO. 9 TAHUN 2025: REORIENTASI TES KEMAMPUAN
AKADEMIK DALAM KONTEKS SEKOLAH MENENGAH VOKASI KEJURUAN**

Sudung Kristopel Naiborhu¹, Hardi Tambunan², Ruth Mayasari Simanjuntak³

^{1,2,3}Universitas HKBP Nommensen

Email: naiborhuchrist@gmail.com¹, tambunhardi@gmail.com², ruthsimanjuntak@uhn.ac.id³

Abstrak: Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) No. 9 Tahun 2025 yang melembagakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) menghadirkan paradoks kebijakan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Filosofi inti pendidikan vokasi adalah "Link and Match", yang berfokus pada asesmen berbasis kinerja untuk menutup kesenjangan kompetensi industri. TKA, sebagai instrumen standarisasi akademik (literasi dan numerasi), berpotensi berkonflik dengan paradigma asesmen autentik yang esensial bagi SMK. Menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III dan teori asesmen autentik Wiggins & McTighe, analisis ini mengidentifikasi tantangan implementasi kritis. Hambatan utama diprediksi terletak pada variabel "disposisi" (sikap skeptis pelaksana) dan "sumber daya" (kapabilitas pedagogis guru vokasi), yang diperburuk oleh ambiguitas tujuan kebijakan antara penjaminan mutu dan alat seleksi Perguruan Tinggi (SNBP). Kajian ini menyimpulkan bahwa tanpa strategi manajerial yang adaptif di tingkat sekolah, TKA berisiko mengalihkan fokus SMK dari kesiapan kerja (*job readiness*) menjadi kesiapan tes (*test readiness*), yang ironisnya dapat memperlebar kesenjangan kompetensi.

Kata Kunci: Tes Kemampuan Akademik (TKA), Permendikdasmen No. 9 Tahun 2025, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Analisis Kebijakan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Vokasi, Asesmen Autentik.

Abstract: The issuance of the Regulation of the Minister of Primary and Secondary Education (Permendikdasmen) No. 9 of 2025 which instituted the Academic Ability Test (TKA) presents a policy paradox for Vocational High Schools (SMK). The core philosophy of vocational education is "Link and Match", which focuses on performance-based assessments to close the industry competency gap. TKA, as an instrument of academic standardization (literacy and numeracy), has the potential to conflict with the authentic assessment paradigm which is essential for vocational schools. Using the policy implementation framework of George C. Edwards III and the theory of authentic assessment of Wiggins & McTighe, this analysis identifies critical implementation challenges. The main obstacles are predicted to lie in the variables of "disposition" (skeptical attitude of implementers) and "resources" (pedagogical capabilities of vocational teachers), which are exacerbated by the ambiguity of policy objectives between quality assurance and the Higher Education Selection Tool (SNBP). This study concludes that without an adaptive managerial strategy at the school level, TKA risks shifting the focus of vocational schools from job readiness to test readiness, which ironically can widen the competency gap.

Keywords: *Academic Ability Test (TKA), Permendikdasmen No. 9 of 2025, Vocational High School (SMK), Education Policy Analysis, Vocational Education Management, Authentic Assessment.*

PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi di Indonesia, khususnya melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diposisikan sebagai pilar strategis dalam penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) terampil. Mandat utama SMK adalah menghasilkan lulusan yang siap kerja dan kompeten sesuai tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Namun, tantangan kronis yang dihadapi adalah "kesenjangan kompetensi" (*competency gap*), di mana lulusan sering dianggap belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi industri, baik dalam *hard skills* maupun *soft skills*.

Sebagai respons, pemerintah menggulirkan kebijakan revitalisasi SMK melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2016, yang berpusat pada filosofi "Link and Match". Kebijakan ini menekankan pendekatan *demand-driven* yang fleksibel, sinkronisasi kurikulum dengan industri, dan fokus pada asesmen kinerja praktis.

Di tengah penguatan paradigma "*Link and Match*" yang berfokus pada praktik, hadir intervensi kebijakan baru yang bersifat terpusat: Permendikdasmen No. 9 Tahun 2025. Kebijakan ini menetapkan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai asesmen terstandar untuk mengukur capaian akademik seperti literasi, numerasi, dan penalaran.

Kebijakan ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, SMK didorong untuk fokus pada asesmen kinerja autentik yang kontekstual. Di sisi lain, TKA memperkenalkan logika standarisasi akademik yang *top-down* dan abstrak.

Konflik diperburuk oleh tujuan ganda TKA. Secara formal, tujuannya adalah penjaminan mutu pendidikan. Namun, dalam praktiknya, TKA diposisikan sebagai "validator nilai rapor" untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) masuk perguruan tinggi. Konflik insentif ini sangat relevan bagi manajemen SMK: mengejar skor TKA untuk SNBP berisiko mendistorsi kurikulum vokasi dan mengorbankan waktu praktik.

Kajian sebelumnya cenderung bersifat normatif. Jurnal ini bertujuan menganalisis implementasi Permendikdasmen 9/2025 dari perspektif analisis kebijakan publik dan manajemen pendidikan. Mengadopsi gagasan Michael Fullan (1999; 2018) bahwa

keberhasilan reformasi ditentukan oleh kualitas implementasi di tingkat pelaksana, penelitian ini berfokus pada realitas manajerial di SMK.

Pertanyaan penelitian yang diajukan: (1) Bagaimana TKA (Permendikdasmen 9/2025) diposisikan dalam lanskap kebijakan "*Link and Match*" (Inpres 9/2016) dan paradigma asesmen autentik? (2) Menggunakan kerangka implementasi Edwards III dan Mazmanian & Sabatier, apa tantangan kritis implementasi TKA di SMK? (3) Apa implikasi manajerial strategis bagi kepemimpinan SMK untuk menyeimbangkan dua tuntutan asesmen ini?

KAJIAN TEORETIS (KERANGKA ANALISIS)

Analisis dalam jurnal ini didasarkan pada tiga pilar teoretis yang membedah kontradiksi antara kebijakan TKA dan konteks SMK.

1. Model Implementasi Kebijakan: Dari Teks ke Aksi

Implementasi adalah fase kritis di mana intensi kebijakan bertemu realitas (Makinde, 2005). Model *top-down* Mazmanian & Sabatier (1983) menekankan pentingnya *tractability* (dapat dikelolanya masalah) dan kemampuan kebijakan menstrukturkan implementasi. Sementara itu, model *actor-centric* George C. Edwards III (1980) berfokus pada empat variabel kritis di tingkat pelaksana: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi (sikap), dan (4) Struktur Birokrasi. Michael Fullan (1999; 2018) menyempurnakan ini dengan menyatakan bahwa perubahan pendidikan yang bermakna hanya terjadi ketika pelaksana di lapangan menemukan "makna" dalam kebijakan tersebut.

2. Paradigma Asesmen: TKA vis-à-vis Asesmen Autentik

Di sinilah letak konflik teoretis inti. TKA (Permen 9/2025) adalah bentuk *Assessment of Learning* (Asesmen atas Pembelajaran). Ini adalah tes sumatif, terstandar, dan normatif yang mengukur konstruk akademik abstrak (literasi/numerasi).

Sebaliknya, pendidikan vokasi internasional telah bergeser ke *Competency-Based Assessment* (CBA). CBA yang valid harus dirancang untuk menilai *kompleksitas situasi kerja yang autentik* (Garraway, 2020). Ini adalah *Assessment for Learning* (Asesmen untuk Pembelajaran), yang didukung kuat oleh teori "*Understanding by Design*" (UbD) dari Wiggins & McTighe (2005). Mereka mengusulkan *Backward Design*, di mana asesmen dimulai dengan pertanyaan: "Apa bukti kinerja (*performance*) yang dapat diterima bahwa siswa telah paham?".

Bukti ini harus berupa tugas transfer autentik (proyek, portofolio, simulasi), bukan tes akademik.

TKA (Permendikdasmen 9/2025) secara filosofis merupakan antitesis dari *Backward Design* dalam konteks vokasi, karena TKA menguji pengetahuan kognitif dengan harapan dapat ditransfer ke pekerjaan, sementara CBA menguji kinerja pekerjaan itu sendiri sebagai bukti pemahaman.

3. Manajemen Spesifik Pendidikan Vokasi

Manajemen SMK berbeda dari sekolah umum. Ia menuntut pengelolaan aset spesifik (bengkel, laboratorium) dan manajemen ekosistem yang erat dengan DUDI (Nieuwenhuis, 2019). Kepemimpinan sekolah (Mulyasa, 2005) harus mampu mengelola kemitraan ini secara strategis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan (*policy analysis*). Metode yang digunakan adalah studi dokumen (*desk research*) dan analisis kerangka kerja konseptual.

Data primer terdiri dari dokumen regulasi inti, yaitu Permendikdasmen No. 9 Tahun 2025 tentang TKA, Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, serta dokumen pendukung seperti Kepmen No. 95/2025 dan Peraturan Kepala BSKAP No. 45/2025. Data sekunder mencakup buku referensi, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan teori implementasi kebijakan, manajemen pendidikan vokasi, dan teori asesmen.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga kerangka teoretis utama sebagai lensa analisis:

1. **Model Implementasi Kebijakan:** Kerangka George C. Edwards III (1980) (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi) dan kerangka Mazmanian & Sabatier (1983) (Karakteristik Masalah, Struktur Kebijakan, Variabel Politik) digunakan untuk membedah potensi kegagalan implementasi.
2. **Manajemen Pendidikan Vokasi:** Teori manajemen spesifik SMK (Hadromi, 2021) dan teori ekosistem vokasi (Nieuwenhuis, 2019) digunakan untuk menganalisis tantangan di tingkat manajerial sekolah.

3. **Paradigma Asesmen:** Teori Asesmen Autentik dan *Backward Design* dari Wiggins & McTighe (2005) serta konsep *Competency-Based Assessment* (CBA) digunakan sebagai antitesis teoretis untuk menganalisis kesesuaian TKA dengan tujuan pendidikan vokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap Permendikdasmen 9/2025 menggunakan kerangka teoretis di atas mengungkap tantangan implementasi yang signifikan dan berlapis di konteks SMK.

1. Analisis Desain Kebijakan (Mazmanian & Sabatier)

Menggunakan kerangka Mazmanian & Sabatier (1983), desain kebijakan TKA memiliki kelemahan inheren untuk SMK.

- ***Tractability of the Problem:*** Kebijakan TKA memiliki *tractability* (daya kelola) yang rendah karena TKA dirancang untuk memecahkan masalah standarisasi mutu akademik dan seleksi PT, sementara masalah fundamental SMK adalah "kesenjangan kompetensi praktik". TKA berpotensi dipandang sebagai "solusi untuk masalah yang salah".
- ***Policy Structuring:*** Kebijakan TKA bersifat *top-down*, kaku, dan seragam. Struktur ini bertentangan secara diametral dengan struktur kebijakan "*Link and Match*" (Inpres 9/2016) yang menuntut fleksibilitas tinggi, kustomisasi kurikulum berbasis DUDI lokal, dan pendekatan *bottom-up*.

2. Tantangan Kritis Implementasi di Lapangan (George C. Edwards III)

Analisis menggunakan model Edwards III (1980) mengidentifikasi empat titik kegagalan utama di tingkat sekolah:

- **Komunikasi:** Terjadi ambiguitas dan inkonsistensi. Ambiguitas tujuan (penjaminan mutu vs. validasi SNBP) menciptakan kebingungan dan konflik insentif bagi kepala sekolah. Pesan kebijakan ini juga tidak konsisten dengan arahan "*Link and Match*" yang telah berlangsung bertahun-tahun.
- **Sumber Daya:** Hambatan tidak hanya pada fasilitas (IT), tetapi pada sumber daya manusia. Guru SMK adalah ahli di bidang kejuruan (praktik), bukan ahli pedagogi literasi akademik. Tuntutan agar mereka mengajarkan literasi/ numerasi menciptakan kesenjangan kapasitas yang besar.

- **Disposisi (Sikap Pelaksana):** Ini diprediksi menjadi hambatan terbesar. Komunitas SMK (guru dan siswa) yang sangat berorientasi pada praktik dan relevansi dunia kerja kemungkinan besar akan memiliki *disposisi* negatif. Mereka akan memandang TKA sebagai "tidak relevan" dan buang-buang waktu praktik yang berharga.
- **Validasi Empiris Internasional:** Disposisi negatif ini bukan sekadar resistensi, tetapi respons rasional yang didukung bukti empiris. Studi di Italia menemukan bahwa intervensi tes akademik bertekanan tinggi (seperti TKA) memiliki *efek positif* pada siswa jalur akademik, tetapi *EFEK NEGATIF* pada prestasi dan motivasi siswa di jalur teknik/vokasi. Studi lainnya tentang ujian terstandar di Tiongkok (*Zhongkao*) menunjukkan bagaimana tes semacam itu berkontribusi pada persepsi bahwa jalur vokasi adalah pilihan "kurang diminati" (*less desirable*). TKA berisiko memicu demotivasi yang sama di SMK Indonesia.
- **Struktur Birokrasi:** TKA menciptakan fragmentasi asesmen. SMK sudah memiliki struktur asesmen puncak (Uji Kompetensi Keahlian/UKK oleh LSP dan industri). TKA (Permen 9/2025) menciptakan "*silo*" asesmen akademik baru yang terpisah. Kebijakan ini gagal menyediakan SOP untuk mengintegrasikan TKA dan UKK, menciptakan kebingungan struktural.

3. Implikasi Manajerial: Menjembatani Paradoks Asesmen

Kepala Sekolah SMK (Mulyasa, 2005; Hadromi, 2021) kini menghadapi dilema manajerial antara memenuhi tuntutan TKA yang bersifat *top-down* dan mandat "*Link and Match*" yang *bottom-up*. Respon manajerial yang buruk adalah "mengajar untuk tes" (*teaching to the test*) dengan menambah jam pelajaran TKA (*drilling*), yang pasti mengorbankan jam praktik.

Strategi manajerial yang adaptif dan superior harus mengadopsi prinsip *Backward Design* (Wiggins & McTighe, 2005), yaitu **Integrasi, Bukan Adisi**. Kepemimpinan instruksional harus memfasilitasi guru agar menanamkan (*embedded*) literasi dan numerasi *ke dalam* proyek-proyek vokasi yang autentik. Sebagaimana contoh: Numerasi diajarkan saat menghitung material dan biaya di *teaching factory*; Literasi diajarkan saat menyusun proposal proyek atau manual operasional alat.

Selain itu, kepala sekolah harus secara aktif melakukan **manajemen ekosistem**. Mereka harus mengadvokasi dan mengkomunikasikan kepada DUDI dan orang tua bahwa skor TKA *bukan* indikator utama kesuksesan lulusan SMK. Standar emas kesiapan kerja tetaplah portofolio UKK, sertifikasi industri, dan rekam jejak proyek autentik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Permendikdasmen No. 9 Tahun 2025 menghadirkan paradoks filosofis dan implementatif bagi SMK. Kebijakan ini mempertentangkan logika standarisasi akademik (TKA) dengan logika asesmen kompetensi praktik ("*Link and Match*").
2. Tantangan implementasi terbesar diprediksi bukan pada aspek teknis, melainkan pada aspek "disposisi" (sikap) pelaksana, yang memandang TKA tidak relevan. Temuan internasional mendukung validitas kekhawatiran ini, di mana tes akademik bertekanan tinggi dapat berdampak negatif pada siswa vokasi.
3. Pemanfaatan ganda TKA sebagai alat seleksi SNBP adalah pendorong utama konflik insentif, yang berisiko mengalihkan fokus SMK dari *job readiness* menjadi *test readiness*.
4. Keberhasilan implementasi TKA di SMK bergantung mutlak pada kapasitas manajerial kepala sekolah untuk melakukan adaptasi kurikulum yang cerdas (integrasi, bukan adisi) dan mengelola ekspektasi pemangku kepentingan.

Rekomendasi Kebijakan (Makro - untuk Kemendikdasmen & BSKAP)

1. **Diferensiasi Instrumen:** Mendesak dikembangkan model TKA yang terdiferensiasi (TKA-Vokasi), di mana soal literasi dan numerasi disajikan dalam konteks masalah kejuruan yang autentik.
2. **Diferensiasi Pemanfaatan (SNBP):** Untuk seleksi SNBP jalur SMK, bobot TKA harus disesuaikan dan wajib dikombinasikan dengan bukti kinerja autentik (misalnya, nilai portofolio Uji Kompetensi Keahlian/UKK).
3. **Klarifikasi Komunikasi:** Pemerintah harus memperjelas komunikasi bahwa TKA di SMK berfungsi utama sebagai alat diagnostik untuk perbaikan pembelajaran (*assessment for learning*), dan *bukan* pengganti asesmen kompetensi praktik sebagai standar kesiapan kerja.

Rekomendasi Manajerial (Mikro - untuk Kepala Sekolah SMK)

1. **Tolak "Drilling", Terapkan "Integrasi":** Kepala sekolah harus memimpin penerapan model integrasi, di mana literasi/numerasi diajarkan *melalui* proyek-proyek kejuruan yang autentik, sejalan dengan prinsip *Backward Design*.
2. **Perkuat Asesmen Autentik:** Gunakan TKA sebagai momentum untuk memperkuat *Competency-Based Assessment* (CBA). Tunjukkan kepada siswa bagaimana literasi/numerasi (yang diukur TKA) esensial untuk mendukung kinerja tugas-tugas kejuruan yang kompleks di dunia nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, N. (2016). *Manajemen Pendidikan*. Dikutip dalam Asia, dkk. (2023).
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Cendekia Press.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). (2025). *Peraturan Kepala BSKAP No. 45 Tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen TKA (SMA)*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). (2025). *Peraturan Kepala BSKAP No. 47 Tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen TKA (SD & SMP)*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy (14th ed.)*. Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fatah, N. (2011). *Manajemen Pendidikan*. Dikutip dalam Asia, dkk. (2023).
- Fullan, M. (1999). *Change forces: Probing the depths of educational change*. London: The Falmer Press.
- Fullan, M. (2000). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press.
- Fullan, M. (2005). *Leadership and sustainability: Systems thinkers in action*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fullan, M. (2018). *The dynamics of educational change*. Dikutip dalam berbagai sumber.
- Garraway, J. (2020). Designing complex, challenging and creative assessments for work preparedness. *Journal of Vocational Education & Training*, 5(1), 116-134.

- Gorton, R. A. (2009). *School Administration and Supervision: Leadership Challenges and Opportunities*. McGraw-Hill.
- Grubb, W. N. (1995). *Education through occupations in American high schools: The challenges of implementing curriculum integration*. New York: Teachers College Press.
- Hadromi. (2021). *Manajemen pendidikan kejuruan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadromi, Khumaedi, M., & Kueniawan, A. (2024). *Manajemen Laboratorium & Bengkel Otomotif Sekolah Kejuruan*. Yogyakarta: CV. MAHATA.
- Hanushek, E., Wößmann, L., & Str, P. (2005). Does educational tracking affect performance and inequality? Differences-in-differences evidence across countries. *NBER Working Paper*.
- Hidayat, R., & Wibowo, A. (2016). Upaya Memperkecil Kesenjangan Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Tuntutan Dunia Industri. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 23(1).
- Kadji, Y. (2015). *Model Implementasi Kebijakan*. Dikutip dalam Fidiyah (2021).
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. (2025). *Keputusan Menteri No. 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA*.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik*. Jakarta: Kemendikdasmen.
- Lestari, S., & Millenia, S. (2022). Reformasi kurikulum adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. *Jurnal Pendidikan*.
- Makinde, T. (2005). Problems of Policy Implementation in Developing Nations: The Nigerian Experience. *Journal of Social Science*, 11(1), 63–69.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukkseskan Manajemen Berbasis Sekolah dan Otonomi Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nieuwenhuis, L. F. M. (2019). *Ecosystem approach in vocational education*. Dikutip dalam Jurnal Zaheen (2024).
- Paudel, N. R. (2009). A critical account of policy implementation theories: Status and reconciliation. *Nepalese Journal of Public Policy and Governance*, 25(2).

- Republika Indonesia. (2016). *Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia*.
- Sagirani, T., Riyanto, D. Y., Arifin, M., & Erstiawan, M. S. (2024). Pelatihan Tools AI bagi Siswa SMK sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Digital dan Kesiapan Kerja. *Karya Nyata Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Siagian, S. P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanti, R. (2024). *Innovating for Innovators: A Case Study of Organizational Innovation and K-12 Educational Reform in China*. RAND Corporation.
- Thomson, P. (1989). The assessment of practical skills and experience. *Australian Journal of TAFE Research and Development*, 4(2).
- Wiggins, G. P., & McTighe, J. (2005). *Understanding by Design (2nd ed.)*. Alexandria, VA: ASCD.
- Wolf, A. (1995). *Competence-Based Assessment*. Buckingham: Open University Press.
- Yusop, F. D., Rasul, M. S., Yasin, R. M., Hashim, R., & Jalaludin, A. A. (2022). An Assessment Approaches and Learning Outcomes in Technical and Vocational Education (TVET): A Systematic Review. *Sustainability*, 14(9), 5225.